

Analysis of the Role of Stakeholders in the Economic and Social Empowerment Program through the Agrosilvopastura System in Ngasem District, Bojonegoro Regency

Analisis Peran Stakeholders dalam Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Sistem Agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

Siti Nor Kasanah^{1*}, Ahmad Suprastiyo², Cahya Lukita³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Corresponding author: sitinorkasanah45@gmail.com

Abstract: The Agrosilvopasture system is a combination of the forestry, agriculture and livestock sectors in one land management unit. The aim of this research is to analyze the role of stakeholders in the economic and social empowerment program through the agrosilvopasture system in Ngasem District, Bojonegoro Regency. This research uses qualitative methods. With data collection methods through observation, interviews and documentation. The informants involved were eight people. Technical data analysis is carried out using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validity technique is carried out through source triangulation, technical triangulation and time triangulation to test the credibility of the data that has been obtained. The research results show that the agrosilvopasture system-based economic and social empowerment program has shown significant success in improving the welfare of communities around the forest through sustainable integration of agriculture, forestry and animal husbandry. The success of the program was achieved not only through increasing land productivity and community income, but also in restoring the ecological function of the forest. The role of strategic stakeholders, including policy creators, coordinators, facilitators, implementers and accelerators, is very important in creating effective synergies despite obstacles such as difficult road access, low human resource capacity and other technical obstacles. By collaborating between stakeholders and a participatory-based approach, we succeeded in overcoming obstacles in the program.

Keywords: Stakeholders; Economic Empowerment; Agrosilvopasture System

Abstrak: Sistem Agrosilvopastura merupakan gabungan sektor kehutanan, pertanian dan peternakan dalam satu kesatuan pengelolaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang terlibat berjumlah delapan orang. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang dilakukan melalui triangulasi sumber triangulasi teknik dan triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis sistem agrosilvopastura telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui integrasi pertanian, kehutanan, dan peternakan secara berkelanjutan. Keberhasilan program tercapai tidak hanya melalui peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam pemulihan fungsi ekologis hutan. Peran strategis *stakeholders*, termasuk *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator sangat penting dalam menciptakan sinergi yang efektif meskipun terdapat tantangan seperti akses jalan yang sulit, kapasitas SDM yang rendah dan kendala teknis lainnya. Dengan berkolaborasi antara *stakeholders* dan pendekatan berbasis partisipatif berhasil mengatasi hambatan dalam program.

Kata Kunci: Stakeholders; Pemberdayaan Ekonomi; Sistem Agrosilvopastura.

History Article: Submitted 4 November 2024 | Revised 26 November 2024 | Accepted 1 December 2024

How to Cite: (Kasanah et al., 2024). Kasanah, S. N., Suprastiyo, A., & Lukita, C. (2024). Analisis Peran Stakeholders dalam Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Sistem Agrosilvopastura Di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(12), 112–122.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v12i2.22186>



© the Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Pemanasan global adalah ketidakseimbangan ekosistem bumi telah terjadi akibat peningkatan suhu rata-rata udara, lautan, dan daratan (Triana, 2008). Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan dan bencana alam. Perubahan iklim saat ini menjadi tantangan serius yang berdampak luas pada lingkungan dan keberlanjutan ekonomi, hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menjawab semakin besarnya tantangan pemanasan global yang tidak hanya menyebabkan perubahan iklim namun juga memperburuk penurunan kualitas lingkungan hidup di dunia. Hutan adalah salah satu sektor yang terdampak paling signifikan oleh perubahan iklim dan pemanasan global, di mana hutan dianggap sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hutan tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem tetapi juga memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat. Hutan dianggap sebagai aset alam yang kaya akan nilai ekonomi, akan tetapi kini hutan mengalami perubahan yang cepat (Taufiq et al., 2023).

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022 menunjukkan luas lahan hutan Indonesia mengalami peningkatan, jumlahnya meningkat dari 94,1 juta hektar menjadi 95,5 juta hektar, menempati 50,9% dari total luas daratan. Dan sebanyak 35% total penduduk Indonesia tinggal di kawasan hutan berkisar 10,2 juta jiwa. Hutan di Indonesia berdampak besar pada perekonomian, terutama bagi masyarakat sekitar yang rentan kemiskinan akibat penebangan liar, konversi lahan, dan pembangunan. Apabila dibandingkan dengan total populasi di Indonesia sebesar 3,8% dari penduduk di sekitar hutan merupakan golongan miskin. Ketidakmampuan tersebut terlihat dari kurangnya kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Kumalasari et al., 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tiawarman et al., (2023) menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya wisata mangrove belum efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Priyaman. Karena masih memiliki beberapa aspek efisiensi serta peningkatan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya wisata mangrove, misalnya tujuan yang jelas, strategi yang terdefinisi dengan baik, ketersediaan bahan dan infrastruktur, serta peningkatan efisiensi dan pelaksanaan tugas yang efektif.

Kabupaten Bojonegoro terletak di daratan yang mudah dinavigasi dan sebagian besar dialirakan oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir melalui 15 kecamatan (Wulandari et al., 2024). Salah satunya adalah Kecamatan Ngasem yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan menghadapi tantangan serius dalam bidang perekonomian dan keberlanjutan lingkungan serta tercatat sebagai salah satu kecamatan termiskin nomor 3 di Kabupaten Bojonegoro (Cahyono, 2018). Sedangkan data terbaru yang di publikasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menyatakan bahwa kecamatan Ngasem menduduki peringkat pertama sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Kondisi ini diiringi dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah, terutama menjadi salah satu lokasi penghasil migas. Sumber daya alam yang tersedia, terutama lahan pertanian dan hutan belum di kelola secara optimal sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas dan ketersediaan pangan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Negara memiliki kewenangan atas penguasaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan kekayaan alam lainnya, yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura muncul sebagai solusi yang diharapkan dapat menanggulangi masalah perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngasem. Namun sampai saat ini berdasarkan literasi yang tersedia, belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis peran masing-masing *stakeholders* dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul analisis peran *stakeholders* dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Sistem Agrosilvopastura merupakan gabungan sektor kehutanan dan pertanian sekaligus pengelolaan peternakan dalam satu kesatuan pengelolaan lahan. Secara ekonomi dan sosial, agrosilvopastura berkontribusi terhadap peningkatan mata pencaharian dan ketahanan pangan (Kumar et al., 2023). Penerapan sistem agrosilvopastura memerlukan peran aktif dari berbagai

stakeholders. *Stakeholders* memiliki fungsi dan kontribusi yang berbeda-beda dalam mendukung keberhasilan program. *Stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan serta merasakan dampaknya, baik secara positif maupun negatif (Hidayah et al., 2019).

Menurut Nugroho et al., (2014) *stakeholders* yang mendukung program diklasifikasi berdasarkan perannya, sebagai berikut:

- a) *Policy Creator*, *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.
- b) Koordinator, *stakeholders* yang berperan dalam mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat dalam kebijakan.
- c) Fasilitator, *stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d) Implementer, *stakeholders* yang berperan sebagai pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e) Akselerator, *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat dari pada waktu pencapaiannya.

Meskipun peran *stakeholders* dalam berbagai konteks telah banyak dibahas, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi keterlibatan *stakeholders* dalam program agrosilvopastura sebagai pendekatan inovatif untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, *stakeholders* berperan dalam menyediakan sumber daya, kebijakan, pendampingan, serta memfasilitasi pembelajaran bagi masyarakat untuk memaksimalkan potensi lahan yang ada. Peran bukan berarti hak atau kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenang (Lukito, 2017). Dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura ini melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain Dinas Peternakan dan Perikanan, KPH Perhutani, CDK, PEPC, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), IDFoS Indonesia selaku tim pendamping, dan Kepala Desa. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Aji et al., (2021) menunjukkan bahwa LMDH Renganis berperan sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, dan implementer. Pihak perhutani berperan sebagai koordinator, fasilitator dan akselerator. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai pengambil kebijakan. SDInpres dan Bank BRI bertindak sebagai perantara. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM) berperan sebagai moderator dan akselerator. Departemen Kehutanan Cabang (CDK) Wilayah Jember sebagai fasilitator, koordinator dan akselerator. Pemerintahan Desa sebagai koordinator. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Rachmah et al., (2023) yang menunjukkan Peran masyarakat di sekitar hutan sangat penting dalam merawat dan menjaga keberlangsungan hutan. Meskipun begitu, mereka juga rentan dari segi sosial ekonomi. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Masyarakat yang tinggal dikawasan sekitar hutan telah dikenalkan dan mulai mengembangkan agrosilvopastura. Keuntungan dari program ini akan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi bagian dari LMDH Wana Karya Lestari di lokasi ini. Melalui penerapan konsep agrosilvopastura, pengetahuan masyarakat mengenai model tersebut terus meningkat. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara nilai pada tes awal dengan tes akhir sebagai langkah selanjutnya dalam program tersebut. Hasil penelitian Mollah et al., (2017) menunjukkan Agrosilvopastura memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, sementara juga mendorong praktik pertanian organik, memanfaatkan bahan alami yang berasal. Mitra dalam kegiatan ini ialah Kelompok Tani Balocci serta kelompok tani Massulowalie dari Desa Benteng Gajah dalam Kecamatan. Agrosilvopastura merupakan metode yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan dengan tujuan pemberdayaan penduduk di desa Benteng Gajah. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang mayoritas pembahasannya terkait Peran *Stakeholders* Dalam Program Agrosilvopastura sehingga perlu adanya penelitian serupa tetapi dengan tujuan terkait yaitu mengenai analisis peran *stakeholders* dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem.

Hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah seorang *stakeholders* pada hari senin (30/09/2024), terdapat salah satu informasi yang diperoleh bahwa masyarakat daerah Kecamatan Ngasem mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat sasaran terhadap *stakeholders*. Menanggapi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran

stakeholder dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis ekologi melalui sistem agrosilvopastura. Dalam konteks ini, setiap peran yang dimainkan oleh stakeholders, baik sebagai *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementer, maupun Akselerator, akan berkontribusi terhadap keberhasilan program. Namun, sebagaimana diungkapkan Syaifudin et al., (2022) menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa menjadi pelaksana kebijakan, menjalankan program, dan berperan sebagai pendamping. Pemerintah Desa Jurug berperan dalam merancang kebijakan terkait pengembangan desa wisata terbilang bagus. Namun, ketika sampai implementasi dan pendampingan, kinerja Pemerintah Desa Jurug perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa hal yang menghambat implementasi program, seperti ketidakmampuan dalam melakukan tindak lanjut sosialisasi menyebabkan partisipasi masyarakat yang minim, serta permasalahan seputar pencemaran sungai oleh limbah kotoran hewan. Pemerintah Desa Jurug telah melaksanakan program pendampingan di sektor ekonomi, kepemudaan, dan keagamaan. Namun, peningkatan dalam pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan dapat ditingkatkan, mengingat belum tersedianya lembaga kepemudaan yang dapat menjadi tempat bagi para pemuda untuk ikut serta dalam program yang telah dilaksanakan. Penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijakan serta menemukan solusi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi program desa wisata. Selain itu, memberikan fasilitas yang mendukung dalam bidang kepemudaan dan keagamaan. Dengan demikian, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa dan mendukung pengembangan desa wisata.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang telah dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi. Menurut Salimul Jihad (2017) Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan data berupa deskripsi verbal dan ilustrasi dari individu atau perilaku yang menarik perhatian. Data yang dipakai diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan untuk penelitian ini didasarkan pada *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Informan berjumlah delapan orang yang terdiri dari IDFoS Indonesia, LMDH, PEPC, CDK, KPH Perhutani, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Desa dan Lembaga Amil Zakat. Analisis data dilakukan dengan langkah mereduksi data, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data yang dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh. Lokasi penelitian yang dipilih ialah Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Dasar pemilihan lokasi penelitian karena program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura di laksanakan di Kecamatan Ngasem serta belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai analisis peran stakeholder dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura.

Hasil dan Pembahasan

Program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura menjadi salah satu pendekatan holistik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal disekitar hutan melalui integrasi kegiatan pertanian, kehutanan, dan peternakan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, program ini dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, melainkan juga untuk memastikan keberlanjutan ekologi melalui pengembalian fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif *stakeholders* yang bertindak sebagai ujung tombak dalam setiap tahap pelaksanaan. *Stakeholders* atau yang lebih dikenal sebagai pemangku kepentingan didefinisikan oleh Mahfud et al., (2014) sebagai kelompok organisasi, baik yang berbentuk laki-laki maupun perempuan, yang memiliki keterlibatan, kepentingan atau terdampak oleh suatu program pembangunan. Program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Salah satu keberhasilannya adalah peningkatan produktivitas lahan yang sebelumnya kosong kini ditanami ratusan tanaman produktif. Selain itu, penggunaan pupuk

kompos dari limbah ternak kambing tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah tetapi juga menjadi bagian penting dari siklus pertanian yang berkelanjutan. Dalam aspek peternakan, pengelolaan kambing mulai menunjukkan pola yang lebih efisien, dan menghasilkan dampak ekonomi walaupun jumlahnya masih dalam tahap pertumbuhan.

Selain manfaat ekonomi, program ini juga menciptakan manfaat sosial berupa peningkatan kerja sama antar anggota masyarakat dan peningkatan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Melalui sistem distribusi lahan dalam bentuk sepetak bagi setiap anggota, masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil panen seperti jagung dan padi, tetapi juga memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini. Namun, dalam pelaksanaan program pasti akan menghadapi berbagai tantangan seperti akses jalan yang sulit membuat beberapa masyarakat enggan untuk aktif berpartisipasi. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia yang rendah serta pola pikir yang belum sepenuhnya menerima inovasi menjadi tantangan yang harus diatasi. Di sinilah pentingnya peran *stakeholders* dalam memastikan bahwa program ini dapat terus berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan. Nugroho et al., (2014) mengemukakan bahwa terdapat lima klasifikasi stakeholder berdasarkan perannya yaitu sebagai *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementer dan Akselerator.

a. Peran *stakeholders* sebagai *policy creator*

Peran *policy creator* dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis sistem agrosilvopastura memiliki posisi yang sangat penting, khususnya dalam menyusun kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan kawasan hutan. Dinas Peternakan dan Perikanan, KPH Perhutani, CDK, dan PEPC memainkan peran strategis sebagai pembuat kebijakan utama. Mereka merancang kebijakan yang mencakup penyediaan lahan, pendanaan, dukungan teknis berupa bibit tanaman, dan pembinaan lembaga masyarakat desa hutan. Kebijakan ini dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dalam prosesnya, *policy creator* tidak bekerja secara terisolasi. Mereka melibatkan masukan dari berbagai pihak, seperti IDFoS Indonesia, yang memberikan data berbasis lapangan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan lokal, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sulitnya akses jalan menuju lokasi program. Kolaborasi ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya relevan tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif. Sesuai dengan teori Nugroho et al., (2014), bahwa *policy creator* bertanggung jawab tidak hanya dalam proses perumusan kebijakan tetapi juga dalam menciptakan solusi yang partisipatif dan berbasis bukti.

Kebijakan yang dirancang dalam program ini memiliki dua tujuan utama yaitu pengembalian fungsi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sistem agrosilvopastura. Salah satu contohnya adalah kebijakan penyediaan lahan oleh KPH Perhutani yang memungkinkan masyarakat desa hutan (LMDH) untuk mengelola lahan dengan sistem tumpang sari. Lahan ini digunakan untuk menanam padi, jagung, dan tanaman pakan ternak, serta untuk beternak kambing yang menghasilkan pupuk kompos guna meningkatkan kesuburan tanah. Kebijakan ini juga menciptakan skema pembagian hasil yang adil, di mana LMDH memperoleh 75% hasil, sementara KPH Perhutani memperoleh 25%. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari dampak positif program, seperti peningkatan jumlah tanaman di lahan yang sebelumnya kosong, peningkatan kesuburan tanah berkat penaburan pupuk kompos dari kambing, dan pengelolaan kambing yang semakin terstruktur. Meskipun sempat terjadi penurunan jumlah kambing akibat pola budidaya yang belum optimal. Namun, sejak 2024 jumlahnya mulai meningkat setelah diterapkan pola pengelolaan baru. Selain itu, adanya dukungan teknis berupa penyediaan bibit rumput dan jahe oleh Dinas Peternakan dan CDK menunjukkan bagaimana kebijakan yang strategis mampu mendukung keberlanjutan program di lapangan. Penelitian terdahulu yang mendukung temuan ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis partisipasi stakeholder dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat (Lubis et al., 2019). Hal ini sejalan dengan temuan program agrosilvopastura, di mana kolaborasi antara pembuat kebijakan dan IDFoS Indonesia sebagai penyedia data lapangan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kondisi setempat. Lubis et al., (2019) juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan dengan melibatkan masyarakat dapat mengatasi tantangan sosial ekonomi secara lebih efektif. Dalam konteks ini, program

agrosilvopastura telah menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan memulihkan fungsi hutan. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya peran strategis pembuat kebijakan dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang adaptif terhadap tantangan lokal.

b. Peran *stakeholders* sebagai Koordinator

Peran koordinator dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial, seperti yang dijelaskan oleh Nugroho et al., (2014) sangat krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi kerja antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, IDFoS Indonesia berperan sebagai koordinator yang mengorganisir dan menyelaraskan berbagai kegiatan, memastikan komunikasi yang efektif, serta membantu mencapai tujuan bersama. Peran ini sejalan dengan temuan Sugiarto et al., (2018), yang menekankan pentingnya peran koordinator dalam memastikan sinergi antar stakeholder untuk mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat. Dalam proses koordinasi, penyampaian laporan perkembangan program kepada *stakeholders* menjadi aspek penting. Namun, metode penyampaian informasi harus disesuaikan dengan preferensi penerima. Beberapa *stakeholders* mungkin lebih nyaman menerima laporan tertulis yang detail, sementara yang lain lebih menyukai informasi visual seperti foto atau infografis yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, koordinator perlu memahami preferensi komunikasi masing-masing *stakeholders* untuk memastikan informasi disampaikan secara efektif. Penelitian oleh Sahputra et al., (2024) menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang disesuaikan dengan preferensi penerima dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam program pemberdayaan. Dengan memahami preferensi komunikasi masing-masing *stakeholders* dan mengemas informasi dengan cara yang menarik, koordinator dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

c. Peran *stakeholders* sebagai Fasilitator

Fasilitator memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura. Menurut Nugroho et al., (2014) fasilitator memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, termasuk memastikan kelancaran implementasi program melalui hubungan yang baik antar *stakeholders*. Sebagai penghubung utama, fasilitator memainkan peran strategis dalam memperkuat hubungan antar stakeholder serta menciptakan kerja sama yang harmonis untuk mencapai hasil optimal. Peran ini melibatkan dukungan teknis, administrasi, hingga pendanaan yang diperlukan bagi keberhasilan program. Dalam konteks ini, IDFoS Indonesia berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Peternakan dan Perikanan, KPH Perhutani, PEPC, CDK, Lembaga Amil Zakat dan Kepala Desa agar setiap stakeholder memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya, seperti pelatihan teknis, penyediaan lahan, pendanaan, administrasi surat-menyerat, serta bantuan bibit jahe, pisang dan lain-lain.



Gambar 1. Pemberian Bibit Jahe kepada LMDH Tahun 2024

Pemberian bantuan bibit jahe dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem merupakan langkah yang perlu diambil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan. Harapan dari pemberian bibit jahe adalah untuk mendukung diversifikasi usaha pertanian dan memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, selain dari hasil peternakan dan kehutanan. Dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura peran masing masing *stakeholders* seperti Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan pembinaan, bimbingan teknis, sedangkan KPH Perhutani, CDK berperan memberikan bantuan bibit seperti bibit pakan ternak, jahe, pisang dan lain-lain, IDFoS Indonesia berperan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kepala desa memiliki peran melayani terkait administrasi program sedangkan PEPC mempunyai peran memberikan dana. Dengan demikian, fasilitator menjadi penggerak utama dalam menghasilkan sistem agrosilvopastura yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi peran fasilitator. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Hal ini sering kali memicu kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penyampaian informasi terkait perkembangan program. Kendala lainnya adalah terbatasnya sumber dana. Dalam hal ini, fasilitator perlu bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mempercepat pencapaian tujuan program.

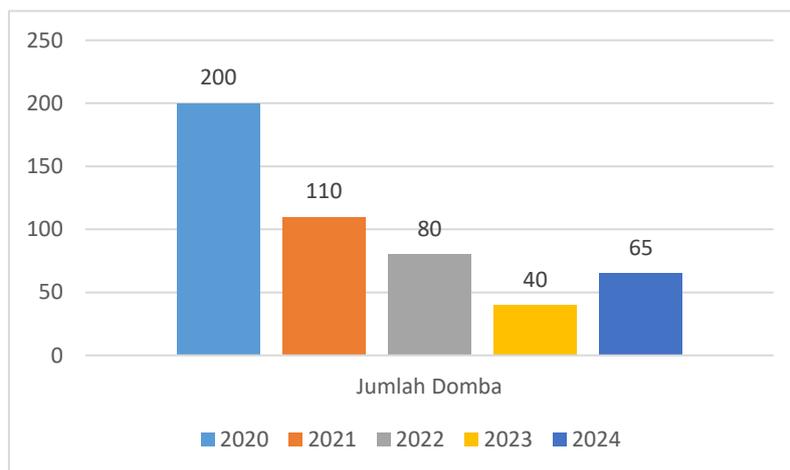
Pantiyasa et al., (2018) menyatakan bahwa fasilitator berperan penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan dukungan teknis dan material dari pihak-pihak terkait. Dalam konteks agrosilvopastura, kemampuan fasilitator untuk mengelola komunikasi menjadi kunci keberhasilan program. IDFoS Indonesia juga harus memastikan bahwa informasi teknis, seperti cara menanam bibit jahe serta rumput pakan ternak perlu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh anggota LMDH. Di sisi lain, IDFoS Indonesia juga harus mampu menyampaikan laporan perkembangan program kepada *stakeholders* pemerintahan dengan cara yang menarik, seperti menggunakan dokumentasi foto atau infografis untuk melengkapi laporan tertulis.

d. Peran *stakeholders* sebagai Implementer

Peran implementer, sebagaimana didefinisikan oleh Nugroho et al., (2014) mencakup tanggung jawab utama dalam merealisasikan visi dan misi program, termasuk pengelolaan aset produktif seperti ternak dan tanaman. Dalam konteks agrosilvopastura, LMDH bertugas merawat ternak kambing, mengelola tanaman, serta menjaga kelestarian lingkungan. LMDH memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis agrosilvopastura. Dalam hal ini, LMDH bertanggung jawab atas pengelolaan teknis aset produktif seperti ternak kambing dan tanaman. Peran mereka tidak hanya terbatas sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pemeliharaan aset yang mendukung keberlanjutan program. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah domba yang dikelola oleh LMDH menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada awal program 2020–2023 di karena kendala kurang gizi, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pakan dan nutrisi belum terpenuhi secara optimal. Namun, peningkatan jumlah domba pada tahun 2024 menjadi indikasi adanya perbaikan pola pengelolaan ternak. Berikut adalah grafik jumlah domba:

Grafik pada gambar 1. di atas menunjukkan perubahan jumlah domba yang dikelola oleh LMDH dalam program agrosilvopastura selama periode 2020–2024. Terlihat bahwa jumlah domba mengalami penurunan drastis dari 200 ekor pada tahun 2020 menjadi hanya 40 ekor pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya mulai meningkat menjadi 65 ekor. Penurunan jumlah domba dari tahun 2020 hingga 2023, seperti yang terlihat dalam tabel, mencerminkan adanya kendala teknis yang signifikan, terutama dalam penyediaan pakan dan nutrisi. Penelitian oleh Tuerah et al., (2023) menekankan bahwa keberhasilan implementasi program pemberdayaan berbasis komunitas sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi kendala lokal. Hal ini sejalan dengan temuan program agrosilvopastura, di mana kendala kurang gizi menyebabkan kematian ternak yang tinggi pada awal program. Namun, peningkatan jumlah ternak pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya perbaikan secara signifikan, seperti peningkatan akses pakan dan pengelolaan ternak yang lebih

baik. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pakan ternak yang memadai, yang merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan program peternakan berbasis masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran implementer yang adaptif dapat membantu memulihkan kondisi program setelah menghadapi kendala teknis. Program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengelola utama aset produktif. Dengan dukungan yang tepat dari *stakeholders* lainnya, dapat memperbaiki hasil dan meningkatkan keberlanjutan program dalam jangka panjang.



(Sumber: Wawancara dengan Informan, 2024)

Grafik 1. Jumlah Domba di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tahun 2024

e. Peran *stakeholders* sebagai Akselerator

Akselerator memiliki tanggung jawab utama untuk mempercepat pelaksanaan program untuk memenuhi target dan harapan yang ditetapkan. Peran *stakeholders* tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis, mencakup upaya untuk mengatasi hambatan teknis, administratif, dan sosial yang dapat menghalangi kemajuan program. Dalam konteks program agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem, Kepala Desa dan IDFoS Indonesia memainkan peran penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program melalui dukungan aktif, pengelolaan potensi lokal, dan penerapan inovasi. Menurut Nugroho et al., (2014) akselerator adalah stakeholder yang bertugas mengoptimalkan sumber daya dan memfasilitasi kolaborasi untuk mengatasi hambatan dalam program pembangunan. Kepala Desa mengungkapkan bahwa dirinya mendukung penuh program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura yang ada di Kecamatan Ngasem, serta siap membantu memfasilitasi proses administrasi seperti penerbitan surat yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan. IDFoS Indonesia juga menekankan pentingnya mempercepat transformasi ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan, dengan agrosilvopastura sebagai solusi holistic untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai akselerator, Kepala Desa dan IDFoS Indonesia berupaya mengurangi hambatan, teknis, administratif, dan sosial yang mungkin muncul, serta memfasilitasi proses yang diperlukan agar program dapat mencapai tujuannya lebih cepat. Dengan peran akselerator yang kuat dan koordinasi yang efektif, program agrosilvopastura diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kecamatan Ngasem. Hal ini sejalan dengan teori Nugroho et al., (2014) bahwa pentingnya efisiensi pada pengelolaan birokrasi adalah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Pada penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Handayani et al., (2024), menekankan pendekatan *bottom-up* dalam pembangunan berbasis masyarakat menjelaskan bahwa pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat lokal, penggunaan potensi sumber daya setempat, dan dukungan fasilitator yang mampu mengatasi kendala struktural. Dalam konteks ini, akselerator bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, sebagaimana terlihat

dari peningkatan jumlah tanaman dari 0 sekarang menjadi ratusan, peningkatan kualitas tanah dengan penerapan pupuk kompos dan peningkatan pengelolaan peternakan. Namun, kendala seperti akses jalan yang sulit dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) menunjukkan perlunya strategi pendampingan yang berkelanjutan, sebagaimana diuraikan oleh Juhro et al., (2021) Mereka menyatakan bahwa akselerator tidak hanya bertugas dalam percepatan awal, tetapi juga dalam mengawal implementasi program agar dapat berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan kapasitas lokal. Dengan demikian, peran akselerator dalam program agrosilvopastura, seperti yang digambarkan dalam penelitian Nugroho et al., (2014), tidak hanya terbatas pada penghapusan hambatan administratif tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan, kolaborasi, dan inovasi berbasis lokal untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.

Tabel 1. Rangkuman Peran *Stakeholders* dalam Program Agrosilvopastura

No	Nama	Policy Creator	Koordinator	Fasilitator	Implementer	Akselerator
1.	IDFoS	✓	✓	✓	✓	✓
2.	LMDH	-	-	-	✓	-
3.	KPH Bojonegoro	✓	-	✓	-	-
4.	Dinas Peternakan dan perikanan	✓	-	✓	-	-
5.	PEPC	✓	-	✓	-	-
6.	Kepala Desa	✓	-	✓	-	✓
7.	Lembaga Amil Zakat	-	-	✓	-	-
8.	CDK	-	-	✓	-	-

Sumber: Wawancara dengan Informan, 2024

Kesimpulan

Program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui sistem agrosilvopastura telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui integrasi pertanian, kehutanan, dan peternakan secara berkelanjutan. Keberhasilan program dapat tercapai tidak hanya terwujud dalam peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam pemulihan fungsi ekologis hutan. Peran strategis *stakeholders* yaitu *policy creator* yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan, KPH Perhutani, CDK, dan PEPC dan IDFoS Indonesia yang bertugas memberikan data berbasis lapangan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan lokal, koordinator terdiri dari IDFoS Indonesia, fasilitator terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan, KPH Perhutani, CDK, dan PEPC, Lembaga Amil Zakat dan IDFoS Indonesia, implementer terdiri dari LMDH, akselerator terdiri dari Kepala Desa dan IDFoS Indonesia, yang semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan sinergi yang efektif. Meskipun terdapat tantangan seperti akses jalan yang sulit, rendahnya kapasitas SDM, dan kendala teknis lainnya namun kolaborasi antar *stakeholders* dan pendekatan berbasis partisipasi telah memungkinkan program ini untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang berkelanjutan. Dengan dukungan terus-menerus dan peningkatan kapasitas, program ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Aji, S., Nik, Dwi, O., & Soejono, D. (2021). Peran Stakeholder terhadap Program Agroforestri dan Pendapatan Rumah Tangga Petani LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. *Jurnal KIRANA*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jkrn.v2i1.25954>
- Cahyono, S. (2018). *Atasi Kemiskinan, Camat Ngasem Gandeng Perhutani*. Jawa Pos.Com.

- DOC-20240228-WA0003.(4).pdf. (n.d.).
- Ellitan. (2009). No Title *طرق تدريس اللغة العربية*. *ЭКОНОМИКА Региона*, 19(19), 19.
- Handayani, N., Alwi, M., Karismawan, P., Mataram, U., Desa, P., Kecamatan, A., Kabupaten, P., & Timur, L. (2024). *Issn : 3025-9495*. 4(5).
- Hidayah, N. A., Hutagalung, S. S., Hermawan, D., Ilmu, F., Lampung, U., & Pringsewu, K. (2019). *Jurnal Administrasi Publik Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangun*. 7, 55–71.
- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal Solikin. *University Library of Munich*, 115855.
- Kasanah, S. N., Suprastiyo, A., & Lukita, C. (2024). Analisis Peran Stakeholders dalam Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Sistem Agrosilvopastura Di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(12), 112–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v12i2.22186>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). SLHI_2022_upload_final_77f9948571. In *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 olh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Kumalasari, A., Taqiyah, B., & Rupiarsieh. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 133–145. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.840>
- Kumar, R., Veeraragavan, M., Baral, K., Saikanth, D. R. K., Singh, V., Upadhyay, L., & Raj, S. (2023). Agroforestry and Its Potential for Sustainable Land Management and Climate Action: A Review. *International Journal of Environment and Climate Change*, 13(12), 620–629. <https://doi.org/10.9734/ijec/2023/v13i123722>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156–163. [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4188](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4188)
- Lukito, C. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1–7.
- Mahasiswa, J., Jmmu, U., & Sahputra, E. P. (2024). *Evaluasi Efektivitas Program Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY Dalam Menjangkau Berbagai Kalangan Masyarakat*. 1(1), 114–123.
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2014). Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070–2076.
- Mollah Jaya Katriani; Kaimuddin, .; Farid BDR, Muh.; Nasaruddin, ., A. M. (2017). Pengembangan Usaha Tani Terintegrasi (Agrosilvopastura) Di Desa Benteng Gajah. *Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP), Vol 2, No 2 (2017): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 2 NO. 2 MEI 2017*, 113–123.
- Nugroho, Cahyo, H., & Zauhar, S. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. 5(1), 12–22.
- Pantiyasa, I. W. (2018). PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1(2). <https://doi.org/10.22334/jihm.v1i2.68>
- Rachmah, M. A., Pertanian, F., Soedirman, U. J., Pertanian, F., Soedirman, U. J., Pertanian, F., Soedirman, U. J., Pertanian, F., & Soedirman, U. J. (2023). *Peningkatan produktivitas ekologi dan ekonomi melalui pengembangan model agrosilvopastura*. 8, 270–276.
- Salimul Jihad, M. S. (2017). Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Dalam Pelajaran Mufrodad Kelas VI MI NW Dasan Agung Mataram Tahun Pelajaran 2016 / 2017. *El - Tsaqafah*, xvii(3), 96–118.
- Sugiarso, S., Riyadi, A., & Rusmadi, R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung

- Pane Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2), 343. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2433>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Taufiq, A., Kasiami, S., & Khusniatin, D. (2023). Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (Studi Kasus Di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro). *JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 1–10.
- Tiawarman, Hendri, & Mubarak, A. (2023). Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Hutan Mangrove dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Apar Kota Pariaman. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2(3), 258–264. <https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.109>
- Triana, V. (2008). Pemanasan Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2(2), 159–163. <https://doi.org/10.24893/jkma.v2i2.26>
- Tuerah, M. S. R., & Tuerah, J. M. (2023). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Kajian Teori: Analisis Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober*, 9(19), 982.
- Wulandari, S., Puspita, S., & Junadi. (2024). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 16–26. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.829>